

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
SECARA SEPIHAK DALAM PERJANJIAN OUTSOURCING
(Studi Kasus Pengadilan Hubungan Industrial Kota Gorontalo)**

Oleh :

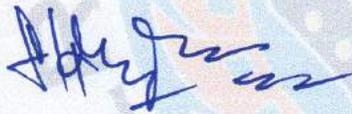
NURUL FATMA THALIB

NIM : 1011415070

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I

Pembimbing II

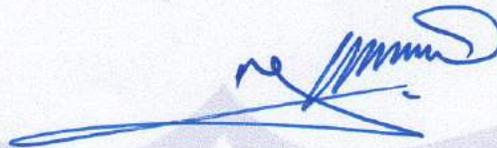


Hj. Mutia CH. Thalib, SH., M.Hum
Nip. 19690704 199802 2 001



Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
SECARA SEPIHAK DALAM PERJANJIAN OUTSOURCING
(Studi Kasus Pengadilan Hubungan Industrial Kota Gorontalo)**

NURUL FATMA THALIB
1011415070

Telah Diuji Dan Dipertahankan Didepan Dewan Penguji

Hari/Tanggal : 26 Juli 2019

Pukul : 13.00 WITA

1. **HJ. NIRWAN JUNUS, SH., MH** (.....)
NIP. 196906022000032 001
2. **DOLOT ALHASNI BAKUNG, SH., MH** (.....)
NIP. 1985082720091 2 005
3. **HJ. MUTIA CH. THALIB, SH., M.Hum** (.....)
NIP. 19690704199802 2 001
4. **SUWITNO YUTYE IMRAN, SH., MH** (.....)
NIP. 198306222009 121 004

Gorontalo, Juli 2019

Mengetahui

Pt. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH, MH
NIP. 197412232003122011

ABSTRAK

Nurul Fatma Thalib, NIM 1011415070. Analisis Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Dalam Perjanjian Outsourcing. Ibu Hj. Mutia Ch. Thalib, SH., M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Suwitno Y. Imran, SH., MH, selaku pembimbing II. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2019.

Perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun peraturan – peraturan ini seperti tidak dipatuhi lagi khususnya oleh perusahaan – perusahaan *outsourcing* yang semena – mena dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dalam perjanjian *outsourcing*, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh karyawan yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif, dikarenakan fokusnya adalah mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, serta menggunakan pendekatan perundang - undangan, pendekatan analisis dan konseptual hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa perusahaan *outsourcing* yakni PT Prima Karya Sarana Sejahtera telah melakukan kesalahan berat yaitu melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Muhammad Rizal Hantulu selaku karyawan *outsourcing* yang bekerja di Bank BRI Unit Kota Timur, untuk itu apa yang dilakukan oleh PT Prima Karya Sarana Sejahtera sangat bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka diharapkan agar para pihak yang semena – mena dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diharuskan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Dan untuk menambah pengetahuan para pekerja atau karyawan diharapkan agar perlu adanya upaya sosialisasi yang komprehensif dan berkesinambungan tentang peraturan perundang - undangan yang terkait dengan penyelesaian kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karena melihat kurangnya pengetahuan karyawan sehingga dapat sangat merugikan karyawan itu sendiri.

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Sepihak, *Outsourcing*

ABSTRACT

Nurul Fatma Thalib, Student's ID 1011415070. Judicial Analysis on One Sided Employment Termination in Outsourcing Contract. Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, 2019. Principal Supervisor: Hj. Mutia Ch. Thalib, SH., M.Hum and Co-supervisor: Suwitno Y. Imran, SH., MH.

Legal protection and human rights including the workers are fulfilment of basic needs that embedded and protected by the constitution as stipulated in Indonesian Constitution of 1945 and Law No. 13 of 2003 on Employment. However, such regulations were not strictly observed, especially by outsourcing companies who were arbitrary toward their employees by one-sided termination of employment this study was aimed to judicially analyzed the one-sided Employment Termination in outsourcing contract, and legal actions that could be taken by the employees as the victim of one-sided employment termination.

This was a normative study as it focused on studying the written law from various aspects, and used the law approach, analysis and legal concept approaches.

This study revealed that the outsourcing company, PT Prima Karya Sarana Sejahtera, had severely violated the law by implementing the one-sided employment termination toward their outsourcing employee, Muhammad Rizal Hantulu, who worked at Bank BRI Unit Kota Timur. This action was against the Law No. 13 of 2003 on Employment. Therefore, it is recommended that the violating company should be held accountable for their action. And employees needed to be made aware of their of their rights as stipulated within the law on their rights regarding the one-sided employment termination. This was recommended due to the lack of employees knowledge on the subject, which made them at disadvantage.

Keywords: One-Sided, Employment Termination, Outsourcing

